

SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KECAPAKAN PARTISIPATORIS PEMILIH PEMULA

Rika Sartika*

ABSTRAK

Pemilih pemula memiliki posisi yang penting dalam Pemilihan Umum dikarenakan jumlahnya setengah bagian dari jumlah keseluruhan pemungut suara. Pemilih pemula sering dideskripsikan memiliki unsteady political orientation sehingga mudah dipengaruhi. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemilih pemula memerlukan kecakapan partisipatoris politik yang memadai, karena apabila pemilih pemula tidak mempunyai kecakapan partisipatoris politik yang memadai maka menyebabkan rendahnya kualitas politik pemilih pemula, yang akan berdampak pada rendahnya kualitas pemilu sehingga diperlukan sosialisasi politik.

Kata kunci : sosialisasi, politik, pemula

PENDAHULUAN

Kategori Pemilih Pemula di Indonesia adalah pemilih yang berusia 17 (tujuh belas tahun) atau sudah pernah menikah bertepatan pada pelaksanaan pemilu, termasuk pensiunan TNI dan Polri yang pertama kali mengikuti pemilu. Perilaku pemilih pemula dideskripsikan dengan antusiasme tinggi, lebih rasional, dan harapan akan perubahan; sejalan dengan kodratnya sebagai generasi muda. Dari kecenderungan memilih tersebut, tidaklah mengherankan jika potensi munculnya golongan putih (Golput) dari pemilih pemula sangat tinggi apabila tidak terdapat sosialisasi politik kepada pemilih pemula. Dari segi kuantitas, pemilih pemula menjadi sasaran dari partai politik, contohnya PKS dengan perolehan 45 kursi dan Partai Demokrat 57 kursi di DPR sebagai *new comer* dalam Pemilu 2004 lalu juga dapat dijadikan cerminan akan suara pemilih pemula yang secara mengejutkan mampu mendudukkan kedua partai tersebut dalam jajaran tujuh partai besar. Mayoritas pemilih PKS dan Partai Demokrat yang didominasi oleh pemilih pemula dan kaderisasi dari kalangan mahasiswa adalah kunci keberhasilan tersendiri yang belum dimiliki partai politik lainnya (www.wordpress.com)

PANDANGAN PEMILIH PEMULA

Pemilih pemula di Indonesia menurut penelitian yang dilakukan oleh NCSS (2003:19) masih memilih berdasarkan besar namanya suatu partai ataupun kapasitasnya dalam menampilkan hiburan yang memadai pada saat kampanye, bukan karena visi dan misi partai tersebut, sehingga *smart voters* yang dapat menghasilkan *good elections* akan sulit didapatkan. Sejalan dengan kondisi diatas, Lee Kaid dkk (2002 : 8) mengatakan bahwa :

With young voters reporting lower levels of political knowledge and information than older voters, and with young citizens often attributing their abstention from voting to their lack of political knowledge, this study focuses on the role that specific campaign messages play in enhancing young voters' political information.

Pemilih pemula memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih rendah dibandingkan dengan bukan yang dikategorikan pemilih pemula. Warga Negara muda sering absen dari pemungutan suara dan pengetahuan politik, padahal suara mereka sangat penting mendukung *status quo* penguasa nantinya, dilihat dari jumlahnya yang terus bertambah sebagai generasi muda, contohnya Kabupaten Tasikmalaya yang pada Pilkada tahun 2011 ini mencapai 75.000 orang (www.pikiran-rakyat.com) sehingga diperlukan penyampaian informasi politik bagi pemilih pemula. Selain itu, Kabupaten Lamongan pun mengharapkan agar LSM dapat ikut mendorong

pemilih pemula yang kebanyakan dari kalangan pelajar agar mau menggunakan hak pilihnya mengingat kesadaran mereka yang masih kurang untuk mempergunakan suaranya.

KECAKAPAN PARTISIPATORIS

Pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu memerlukan seperangkat kecakapan yang harus dikuasai, agar dapat berpartisipasi yang bertanggung jawab, efektif, ilmiah, dalam proses politik di dalam *civil society* (Budimansyah dan Winataputra, 2007: 190). Kecakapan-kecakapan tersebut jika menggunakan istilah dari Branson (1998: 9) dapat dikategorikan sebagai *interacting*, *monitoring* dan *influencing*. Interaksi berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi ialah tanggap terhadap warga negara lain, bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Mengawasi (*monitoring*) berarti fungsi pengawasan warga negara terhadap sistem politik dan pemerintahan. Mempengaruhi (*influencing*) mengisyaratkan pada kemampuan proses politik dan pemerintahan baik proses formal maupun informal dalam masyarakat. Kecakapan inilah yang diperlukan oleh pemilih pemula dalam berpartisipasi dalam pemilu. Uraian hubungan antara kecakapan partisipatoris dan pemilu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Interacting* (interaksi) dalam pemilu) :
 - a. Mengkomunikasikan pemilu
 - b. Bekerjasama menyukseskan pemilu
 - c. Tangap informasi akan pemilu
 - d. Posisinya dalam sebuah konflik
2. *Monitoring* (pengawasan) dalam pemilu
 - a. Mengawasi jalannya pemilu
 - b. Memantau isu pemilu
 - c. Menganalisis peserta pemilu
3. *Influencing* (mempengaruhi) dalam pemilu
 - a. Memberikan suara
 - b. Menyuarakan pendapat dalam pemilu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pemilih pemula di SMA Negeri Kota Bandung, kecakapan partisipatoris yang paling dikuasai pada aspek *interacting*, ialah membaca berita mengenai pemilu 2009. Hal ini menandakan bahwa pemilih pemula sangat terbuka dalam informasi mengenai perkembangan pemilu 2009. Sedangkan kecakapan paling rendah mengenai menempelkan spanduk pemilu. Penguasaan kecakapan ini rendah dikarenakan anggapan bahwa menempelkan spanduk pemilu merupakan tugas anggota KPU ataupun partai politik. Sedangkan siswa sebagian besar belum mengikuti keanggotaan partai politik. Kecakapan yang masih kurang dikuasai oleh pemilih pemula ialah dalam mengenal calon pemilu yang dipilih, hal ini dikarenakan banyaknya peserta pemilu legislatif sehingga pemilih pemula kurang mengenal dengan baik siapa yang akan dipilihnya. Jika dianalisis menggunakan tipologi Almond dan Verba maka kondisi tersebut masuk pada tipe orientasi politik kognitif yaitu pengetahuan dan kepercayaan kepada caleg masih rendah.

Pada kecakapan *monitoring*, yang paling banyak dikuasai oleh pemilih pemula ialah menolak mengikuti kecurangan yaitu sebesar 46,32%, Sangat Baik sebesar 47,37%, Kurang Baik sebesar 6,32%, dan Tidak Baik 0%. Kecakapan ini menyiratkan bahwa pemilih pemula memiliki kecenderungan perilaku dalam berpolitik yang baik dimana mereka telah memilih menolak kecurangan. Kecakapan yang rendah didalam aspek monitoring terletak pada mengikuti kampanye. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa rendahnya mengikuti kampanye dikarenakan adanya kekhawatiran ketidak amanan pelaksanaan kampanye, dikarenakan kampanye identik dengan huru hara. Selain itu terbatasnya waktu yang mereka miliki.

Untuk kecakapan *influencing* diperoleh hasil kecakapan yang paling baik dikuasai oleh pemilih pemula ialah kecakapan Tidak merusak kertas suara dan Memberikan contengan pilihan dalam kertas suara. Kecakapan yang paling rendah ialah pada bagian Mengajak orang lain untuk memberikan suara. Yaitu penguasaan secara Baik sebesar 51,58%, Sangat Baik sebesar 21,5%, Kurang Baik sebesar 18,95% dan Tidak Baik 8,42%.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kecakapan partisipatoris yang paling dikuasai pemilih pemula adalah kecakapan *interacting* yang relatif mudah dilaksanakan oleh pemilih pemula. Sedangkan kecakapan yang paling rendah ialah *influencing* hal ini menandakan pemaknaan pemilu sebagai perwujudan demokrasi masih rendah.

Pemilih pemula di Indonesia jika dilihat dari mekanisme sosialisasi politik, yang terjadi maka dalam aspek instruksi termasuk rendah karena terbatas pada hal formal saja sedangkan proses belajar informal baik pendidikan kejuruan maupun melalui forum diskusi masih rendah dikarenakan keterbatasan informasi mengenai forum diskusi yang diadakan sebagian besar masih terbuka bagi anggota partai politik sehingga penguatan aspek politik masih rendah padahal pendidikan di masyarakat memiliki peran dalam sosialisasi politik.

SOSIALISASI POLITIK PEMILIH PEMULA

Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik (Raga Maran, 2001:136). Melalui sosialisasi politik, individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam kehidupan politik.

Sosialisasi diidentikan sebagai proses pedagogis atau pembudayaan insan-insan politik. Sosialisasi politik yang diperoleh dari pemilih pemula melalui jalur formal sebagian besar didapatkan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun sebenarnya sosialisasi ini pun dapat dilakukan oleh mata pelajaran lainnya seperti sosiologi dikarenakan mata pelajaran ini pun memiliki kajian politik yaitu dinamakan sosiologi politik yang mempelajari tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando didalam semua masyarakat manusia, tidak hanya dalam masyarakat nasional (Raga Maran, 2001 : 25), dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dapat digunakan seperti :

1. Pendekatan historis : menemukan konsern dan minat tradisional dari sosiologi politik sebagai suatu disiplin intelektual melalui karya sosiolog
2. Pendekatan komparatif : mempelajari gejala sosial politik dari suatu masyarakat tertentu dengan menyoroti fenomena yang kita hadapi
3. Pendekatan institusional : mengkonsentrasikan analisisnya pada faktor legalistik
4. Pendekatan behavior : menggunakan individu sebagai dasar analisis

Pendekatan ini relevan digunakan dalam sosialisasi politik dikarenakan masyarakat kita multikultural dan multi aspek sehingga pendekatannya pun tidak bisa digeneralisasikan. Hal inilah sebenarnya yang sering terlewatkan oleh pendidikan kita. Mengingat dalam jalur formal, belum adanya mata pelajaran pendidikan politik yang mempunyai pendekatan kurikulum *separated* dengan mata pelajaran lain, terkecuali mahasiswa yang mengambil bidang kajian politik. Begitu pula di jalur non formal masih kurang, pemilih pemula yang tidak mengenyam bangku pendidikan tidaklah sedikit jumlahnya, sehingga kecakapan partisipatoris yang dimiliki pemilih pemula berbanding terbalik dengan jumlah pemilih pemula itu sendiri.

Terkait dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat kita yang bersifat primodial dimana masyarakat kita masih banyak yang mengikuti pandangan politik orang yang dituakan khususnya orang tua perlu mendapat perhatian dalam proses sosialisasi ini. Perkembangan sosialisasi politik memandang orang tua sebagai agen utama sosialisasi politik namun agen selanjutnya ialah lembaga pendidikan ikut memegang andil dalam memberikan pendidikan yang objektif agar pemilih pemula tidak menjadi anak-anak konservatif yang lebih mementingkan tradisi sebelumnya dan kurang memperhatikan perubahan yang sebenarnya diperlukan. Proses

lanjut ini dapat menumbuhkan kepercayaan-kepercayaan politik sehingga fenomena golput dapat diminimalisir.

Social determinism approach ialah pendekatan yang menyatakan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Aplikasinya terlihat dengan adanya *figure central* pada masing-masing kelompok dengan kecenderungan memilih berdasarkan kesamaan latarbelakang dan faktor yang menarik bagi kelompoknya. Pendekatan ini selaras dengan penemuan Affan Gaffar dalam penelitiannya tentang *Javanese Voters* yang menemukan bahwa agama memiliki pengaruh terhadap pilihan seseorang dalam pemilu. Orang-orang yang mengidentitiasi dirinya sebagai santri cenderung mendukung partai Islam, sementara kelompok abangan cenderung mendukung PDI dan responden yang moderat (santri dan abangan) lebih banyak memberikan pilihan terhadap Golkar (Gaffar, 1992 : 191). Realita tersebut tidak bisa dihindarkan karena berhubungan kultur sosial pemilih pemula yang bersangkutan dan harus terdapat sikap legowo bagi pendidik untuk memberikan kesempatan kepada pemilih pemula menggunakan kebebasan hak pilihnya.

Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, dan orientasi seseorang. Pemahaman ini harus dapat dimiliki oleh praktisi politik maupun para pendidik agar dapat melaksanakan sosialisasi politik transparansi dengan mengenyampingkan kepentingan golongan.

Sosialisasi politik harus berbentuk program yang memuat kebutuhan dasar pemilih pemula berupa pembentukan pola pikir dengan basis rasionalitas untuk mempertimbangkan keputusan memilih atas dasar kemampuan, visi-misi dan *track record* dari partai-partai dan para kandidat. Selain itu diperlukan penanaman kecakapan partisipatoris pemilih pemula agar pemilih pemula dapat berpartisipasi dengan dibekali pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan sebagai insan politik.

Tanggungjawab mencerdaskan pemilih pemula ini tidak hanya tanggungjawab dari *stakeholder* tetapi juga para elemen masyarakat seperti LSM, keluarga pemilih pemula, dan penyelenggara pemilu. Bagi LSM hendaknya sosialisasi politik bagi pemilih pemula tidak secara insidental agar efektif; bagi keluarga agar terbuka terhadap kondisi politik yang ada; bagi masyarakat agar memiliki data pemilih pemula agar dilibatkan dalam proses pemilu; bagi sekolah agar aktif bekerja sama dengan penyelenggara pemilu ataupun LSM untuk dapat mensosialisasikan pemilu pada pemilih pemula sekaligus memberikan kecakapan partisipatoris; bagi partai politik yang memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik hendaklah dapat memilah posisinya antara kepentingan politik dan pendidikan politik dalam menjalankan fungsinya tersebut, bagi mahasiswa sosiologi khususnya sebagai golongan akademis agar dapat memanfaatkan program Kuliah Kerja Nyata dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya sekedar melek politik namun juga cakap politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhamad. 1996. *Demokrasi di Indonesia. Beberapa Pendekatan Dalam Perilaku Pemilih. Jurnal Ilmu Politik* Jakarta : Kerjasama AIPI-LIPI dan Gramedia.
- Branson, M.S. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas : CCE
- Budimansyah & Winatapura. 2007. *Civic Education Konteks, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI

Gaffar, Affan. 1992. *Javanese Voters : A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Gross, R.E & Jelleny. 1987. *Educating Citizens for Democracy*. London : Oxford University Press

Huntington, Samuel P. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta

Lipset, Seymour, M. 2007. *Political Man*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Raga Maran, R. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia

Internet :

No name. *Mencerdaskan Pemilih Pemula*. www.wordpress.com

No name. Jumlah Pemilih Pemula diperkirakan 75000 orang. www.pikiran-rakyat.com